



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 013.09.2.649028/2020**



DS:4781-4216-8042-3101

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (09) | DITJEN HAK ASASI MANUSIA |
| 3. Provinsi | : (28) | MALUKU UTARA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (649028) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA |
| Sebesar | : Rp. | 277.061.000 (DUA RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.09.11 Program Pemajuan HAM
013.09.11.5255 Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	277.061.000
Rp.	277.061.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 277.061.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN T E R N A T E | (062) Rp. | 277.061.000 |
|-----------------------|-----------|-------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.09.2.649028/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:4781-4216-8042-3101

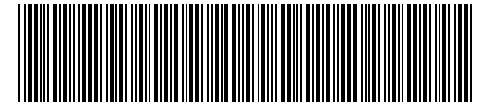
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (649028) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

Kuasa Pengguna Anggaran : RAMLI
Bendahara Pengeluaran : MUNAWAR WAHID
Pejabat Penanda Tangan SPM : RIFQY ADRIAN KRISWANTO

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			277.061.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			277.061.000
2 Program	013.09.11	Program Pemajuan HAM			277.061.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM			
Indikator Kinerja Program	01	Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	70	Persen	
	02	Persentase institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	15	Persen	
	03	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	10	Persen	
	04	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50	Persen	
	05	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	75	Persen	
	06	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial	1	Rekomendasi	
	07	Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang di tindaklanjuti	60	Persen	
Output Program	01	kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM			
Indikator Output Program	01	Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	70	Persen	
	02	Persentase institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	15	Persen	
	03	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	10	Persen	
	04	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50	Persen	
	05	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	75	Persen	
	06	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial	1	Rekomendasi	
	07	Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang di tindaklanjuti	60	Persen	
Kegiatan	5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah			277.061.000
Sasaran Kegiatan	01	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM			
	02	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM			
	02	jumlah kab/kota peduli HAM			
	03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM			
	01	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.09.2.649028/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:4781-4216-8042-3101

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (649028) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

Kuasa Pengguna Anggaran : RAMLI
Bendahara Pengeluaran : MUNAWAR WAHID
Pejabat Penanda Tangan SPM : RIFQY ADRIAN KRISWANTO

Halaman : IA.2

Output Kegiatan	5255.001	Pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 rekomendasi	133.263.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM	99 rekomendasi	
Output Kegiatan	5255.002	Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	4 Instansi Pemerintah	143.798.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan aksi HAM	1 Pemerintah Daerah	
	02	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Kab/Kota	

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.09.2.649028/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4781-4216-8042-3101

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (649028) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
649028	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	-	277.061	-	-	-	277.061		
013.09.11	Program Pemajuan HAM	-	277.061	-	-	-	277.061		
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	-	277.061	-	-	-	277.061		
5255.001	Pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	-	133.263	-	-	-	133.263	28 . 51	
01	RM	-	133.263	-	-	-	133.263	062	
5255.002	Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	-	143.798	-	-	-	143.798	28 . 51	
01	RM	-	143.798	-	-	-	143.798	062	
JUMLAH		-	277.061	-	-	-	277.061		

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.09.2.649028/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4781-4216-8042-3101

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (649028) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

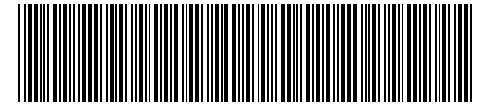
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	649028	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA														
		RENCANA PENARIKAN DANA	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.023	24.038	277.061
		52 BELANJA BARANG	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.023	24.038	277.061
	013.09.11.5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.023	24.038	277.061
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.023	24.038	277.061

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.09.2.649028/2020
IV A. B L O K I R**



DS:4781-4216-8042-3101

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : [28] MALUKU UTARA
Kode dan Nama Satker : [649028] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

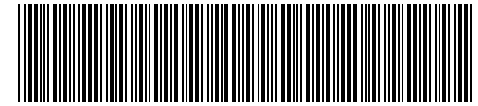
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.09.2.649028/2020
IV B. C A T A T A N**



DS:4781-4216-8042-3101

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : [28] MALUKU UTARA
Kode dan Nama Satker : [649028] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001